

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com

Jumat
08 Maret 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Bandara Betoambari Baubau Tambah Frekuensi Penerbangan ke Baubau Meski Harga Tiket Masih Tergolong Tinggi



Bandara Betoambari Baubau, insert Kepala Baubau Anas Labakara

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Bandara Betoambari menambah frekuensi penerbangan ke Baubau yang tadinya hanya 1 kali dalam sehari menjadi dua kali penerbangan. Pembukaan frekuensi penerbangan itu karena permintaan masyarakat.

Pj Sekda Buton Selatan La Hardin SPd Pimpin Rakor TPID untuk Pengendalian Inflasi



Pewarta: Eron

BUSEL, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus berupaya

dalam pengendalian inflasi daerah, Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin

langsung Pj. Sekretaris Daerah Buton Selatan La Hardin, S.Pd., MM didampingi Asisten Per-

Lanjutkan ke Hal: 7

EKONOMI TPID Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Dengan Pasar Murah



Peliput: Amat Jr

BAUBAU, BP-Kondisi perkembangan harga bahan pokok di Kota Baubau khususnya di 1 (satu) bulan terakhir yang cenderung cenderung naik, dan fenomena ini terjadi secara nasional khususnya kenaikan harga di beberapa komoditas seperti beras, telur ayam ras, daging ayam dan ca-

bai. Hal ini diakibatkan produksi menurun di sentra-sentra produksi. Apalagi, Kota Baubau adalah daerah konsumtif dan minim produksi, dimana produksi-produksi komoditasnya banyak bergantung pada daerah luar, baik di daerah sekitar dalam wilayah pulau buton maupun di kabu-

Lanjutkan ke Hal: 7

Lanjutkan ke Hal: 7

Pj. Bupati Buton La Ode Mustari Hadiri HUT Bank Sultra ke-56



Pewarta: Rahman

BUTON, BPPj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi bersama

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi didampingi Ketua Dharma Wanita Kabupaten

Buton, Ny Kiki Amalia Asnawi menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT)

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

**SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)**

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Bandara Betoambari Baubau Tambah Frekuensi Penerbangan ke Baubau Meski Harga Tiket Masih Tergolong Tinggi

saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (6/4/2024).

Menurut Anas Labakara, Baubau ini sangat strategis. Dari jaman dulu Baubau merupakan kota transit. Itu terbukti sebelum Covid19, penerbangan yang ada disini ada 14 pergerakan, maksudnya ada 7 rute penerbangan PP (pulang-pergi).

Sebelum Covid19 pun harga stabil, tapi setelah Covid19 harga naik. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Mulai dari harga BBM yang naik, harga sewa pesawat dan ketersediaan pesawat itu sendiri.

Dikatakan, seka-

rang setelah Covid19 keadaan penumpang itu fluktuatif atau naik turun jumlahnya. Dari dulu, Airline pesawat menjual dua rute penerbangan. Dan Bulan lalu menyisakan satu rute saja karena tidak memenuhi kuota penerbangan yang disebabkan oleh harga tiket yang tinggi yang bermain di 1,7 juta rupiah untuk rute Baubau-Makassar.

Hanya saja, sekarang ini harga tiket sudah bermain di angka 1,5 juta sampai 1,7 juta.

Sebenarnya kita sangat membutuhkan tambahan penerbangan tetapi memang daya beli

masyarakat yang lagi turun. Dan kalau untuk kebutuhan pergerakan masyarakat Baubau kita harapkan kembali sebelum Covid19 dengan 14 pergerakan dengan 7 rute. Sekarang kita mulai kembalikan secara bertahap. Kita membuka dua rute penerbangan dari Kota Baubau ke Makassar, yaitu penerbangan yang jam 06.30 Wita dan 15.10 Wita,"ujarnya

Ditambahkan, selaku pengelola bandara, Anas Labakara mengharapkan frekuensi penerbangan ini lebih terisi, saat di buka penerbangan animo ma-

sarakat ikut meningkat tapi tergantung kepada kemampuan masyarakat. Dan kalau memang ada bantuan subsidi dari pemerintah daerah itu juga diharapkan. "Jadi airline penerbangan ini full swasta. Pengelola pesawat ini adalah swasta. Kami ini adalah pemerintah. Biaya biaya yang kami gunakan pakai dana dari APBN. Jadi kalau masuk intervensi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan subsidi harga tiket sehingga harganya diharapkan dibawah 1juta itu sangat bagus," tutupnya. (*)

Pj. Bupati Buton La Ode Mustari Hadiri HUT Bank Sultra ke-56

Ke-56 Bank Sultra Cabang Pasarwajo, Senin 4 Maret 2024.

Kedatangan Pj. Bupati Buton dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton disambut hangat oleh Direktur Bank Sultra Cabang Pasarwajo, Syahrul Hidayat beserta Karyawan dan Karyawati Bank Sultra untuk merayakan HUT Bank Sultra Cabang Pasarwajo.

Peringatan HUT Ke-56 Bank Sultra diawali dengan Doa bersama dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan makan bersama.

Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-56 Bank Sultra Cabang Pasarwajo dengan harapan di HUT ke-56 Bank Sultra Kabupaten Buton ini, semakin bersinergi dalam membangun perekonomian daerah khususnya wilayah Kabupaten Buton.

"Tentunya kita akan terus bersinergi dengan Bank Sultra untuk meningkatkan perekonomian daerah. Semoga diulang tahun ke-56 ini, Bank Sultra terus berjaya dan bersinergi untuk membangun daerah," kata La Ode Mustari saat

perayaan HUT ke 56 Bank Sultra.

Pemkab Buton lanjut Pj. Bupati Buton mengatakan akan memback up Bank Sultra Pasarwajo ini sebagai lembaga keuangan utama di Kabupaten Buton dan telah menandatangani surat edaran, yang mana seluruh kontraktor, dan pengusaha - pengusaha yang bermitra di Kabupaten Buton harus membuka tabungan di Bank Sultra Pasarwajo.

"Kita back up seperti ini, karena nanti uang tersebut akan masuk kekas daerah, dan berputar didaerah," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di wilayah Kabupaten Buton jika melakukan simpan pinjam uang, langsung saja ke Bank Sultra Pasarwajo.

"Yang memajukan daerah ini kita sendiri, kalau bukan kita orang Buton siapa lagi," ucapnya.

Pimpinan Cabang Bank Sultra Pasarwajo, Syahrul Hidayat mengapresiasi dukungan Pj. Bupati Buton, La Ode Mustari M.Si salah satu pemegang saham di Bank Sultra, dan

Sekda Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin atas partisipasinya pada hari ini.

Serta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton yang terus memberikan dukungan kepada Bank Sultra untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan lebih baik lagi.

Kini Bank Sultra telah bertransformasi dengan menghadirkan digitalisasi perbankan, dimana sudah memiliki mobile banking, kiris, dan atam bank sultra dapat digunakan sebagai debit pembayaran diseluruh tokoh moderen yang ada di Indonesia.

Syahrul berharap diusia yang ke -56 ini, Bank Sultra semakin jaya, menjadi garda terdepan peyokong perekonomian daerah dan akan berkoordinasi bersama jajarannya untuk terus meningkatkan operasional, terutama pelayanan yang lebih baik lagi, malayani dengan tulus dan sepenuh hati.

Pimpinan Cabang Bank Sultra Pasarwajo, Syahrul Hidayat berharap Bank Sultra Cabang Pasarwajo terus bersinergi bersama pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerah Kabupaten Buton. (*)



Pj Sekda Buton Selatan La Hardin SPd Pimpin Rakor TPID untuk Pengendalian Inflasi

ekonomian dan Pembangunan Setda Buton Selatan Drs. Mz. Amril Tamim, M.Si, Staf Ahli Bupati Buton Selatan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kaimudin, S.Ag., SH., MH, bertempat di Aula Rapat kantor Bupati Buton Selatan, Senin (04/02/2024).

Hadir para Kepala OPD, Staf Ahli Bupati Setda Buton Selatan, para Kabag Setda Buton Selatan, para Camat dan Kepala Desa se-Buton Selatan yang sempat

hadir. TPID merupakan kepanjangan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah. TPID adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di daerah. TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di didaerah.

Cara mengatasi inflasi oleh pemerintah adalah dengan mengadakan Pasar

Murah dan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat (tingkat upah), menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Kenaikan harga beberapa komoditas seperti telur, cabai, dan daging ayam juga berkontribusi terhadap terjadinya inflasi di Indonesia dan terkhusus di Kab. Buton Selatan.

Inflasi terjadi diseti-

babkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Kenaikan biaya produksi menyebabkan barang yang ditawarkan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. (*)

TPID Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Dengan Pasar Murah

paten dalam wilayah Sulawesi Tenggara, termasuk di daerah sentra penghasil di luar Sulawesi Tenggara khususnya di Sulawesi Selatan dan beberapa komoditas lain dari pulau Jawa dan Nusa Tenggara.

Melihat fenomena terjadinya lonjakan harga sebelum ramadhan, Pemerintah Kota Baubau melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menggelar pasar murah di lapangan Lembah hijau Rabu (6/4/2024) dan akan terus dilakukan

rutin selama dua bulan ke depan menjelang lebaran Idul Fitri. Hal dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam rangka mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau.

Sekretaris TPID Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si mewakili Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si dalam sambutannya pada pasar murah tersebut mengagui seperti biasa, menyambut bulan suci ramadhan, permintaan kebutuhan bahan

pokok di masyarakat cenderung terus meningkat, sehingga berdampak pada kenaikan harga. Lonjakan harga yang tinggi tentu akan membebani mengurangi dan daya beli masyarakat, terutama dari kalangan keluarga kurang mampu.

"Bahwa dengan fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat menyikapinya dengan arif, tidak panik, karena fenomena tersebut tidak akan berlangsung lama, mengingat

pada bulan Maret dan April sudah memasuki musim panen. Pemkot Baubau juga terus melakukan langkah-langkah kongkrit dalam pengendalian inflasi daerah dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketepenuhan stok serta kelancaran distribusi pangan, khususnya kebutuhan pokok dan barang penting lainnya,"ujarnya.

Ditambahkan, kehadiran pasar murah ini harganya relatif lebih murah dibandingkan harga di pasaran umum karena adanya

subsidi dari pemerintah. Kemudian, hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan pasar murah ini, untuk lebih mempererat hubungan Pemkot Baubau dengan masyarakat. Terlebih saat ini akan menyambut bulan penuh berkah, dianjurkan untuk saling membantu antar sesama, terutama warga yang kurang mampu. Untuk itu, kepada semua masyarakat Kota Baubau, agar dapat memanfaatkan pasar murah ini dengan baik, dan berbelanja sesuai den-

gan kebutuhan, jangan berlebihan.

Terkait ketersediaan stok beras saat ini, Asmahani membeberkan masih dalam kondisi aman sebab di Gudang Bulog masih tersedia ± 700 ton dan tambahannya saat ini dalam perjalanan sebanyak ± 750 ton. Demikian juga stok yang tersedia di tingkat distributor-distributor hingga minggu ini masih tercatat sebanyak 1.550 ton.

Sementara itu, ada juga program inovasi yang dilakukan

Pemkot Baubau yang dinamakan "LAIDA" (lapak inflasi daerah) khususnya menjual beras sphp kerjasama dengan Bulog yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan di pasar karya nugraha dan pasar wameo dan dalam waktu kedepan manajemennya akan diubah, dimana laida akan berkolaborasi di tingkat kelurahan. Hal ini dapat dimanfaatkan karena beras sphp dijual sesuai harga het, yaitu rp. 54.500/5 kg. (*)

PPP Raih Tiga Kursi DPRD Baubau



Laporan: Hengky TA

BAUBAU, BP - Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Baubau, tuntas digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Hasilnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berhasil mendapatkan tiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau.

PPP berhasil mendapatkan suara sebanyak 11.259 dari tiga Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Baubau. Pada dapil I, PPP mendapatkan 4.582 suara, Dapil II 2874 suara dan dapil III 3803 suara.

Adapun Calon Legislatif (Caleg) PPP yang duduk kursi DPRD Kota Baubau yaitu, Dapil I Natas Aryu Prawira Tamim dengan memperoleh 1703 suara, Dapil

II Aswan Syafudin memperoleh 1020 suara dan Tajuddin (Mandor) memperoleh 1724 Suara, Dapil

Sekretaris Umum DPC PPP Baubau, Khairil Abdisaat dikonfirmasi, (6/3/2024) mengatakan, jumlah perolehan kursi pada Pemilu tahun 2024 ini mengalami kenaikan dua kursi dari jumlah perolehan kursi pada 2019 lalu. "Jadi PPP Baubau ini alhamdulillah suara kita masih menjadi pemenang, 11.259 suara didapatkan, dari hasil rekapitulasi KPU Kota," jelasnya.

Untuk diketahui, Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 187 Tahun 2024 yang ditetapkan Ketua KPU La Ode Supardi di Baubau, 5 Maret 2024. Tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Baubau Nomor 186 Tahun 2024.

Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Tahun 2024. Hasil pleno KPU tersebut kemudian dihitung menggunakan metode Sainte League untuk menentukan perolehan suara partai politik (Parpol) ke kursi parlemen.

Adapun perolehan suara Parpol yang mendapatkan kursi, di DPRD Kota Baubau yaitu, Golkar 11.575 suara, PPP 11.259 suara, PDI P 9.953 suara, Hanura 8.229 suara, Nasdem 6.920 suara, PAN 6.706 suara, PKB 6.671 suara, Gerindra 6.568 suara, PKN 6.431 suara, PKS 3.481 suara, Demokrat 3.434 suara dan PBB 2.754 suara.*

KPU Baubau Pleno Hasil Pilcaleg, Golkar Raih Suara Terbanyak, Disusul PPP dan PDIP



Pewarta: Ardi

BAUBAU, BP - Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota Baubau pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Partai Golkar meraih suara tertinggi pemilu legislatif DPRD tingkat Kota Baubau.

Berdasarkan data Model-D, Hasil KABKO- DPRD KABKO yang himpun media ini, Partai berlambang pohon beringin meraih total suara 11.575 suara, Golkar menempati posisi pertama. Kemudian di susul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan total perolehan 11.259 suara dan posisi ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan 10.895 suara.

Posisi ke empat diraih oleh partai Ha-

nura dengan perolehan 8.224 suara, kemudian di susul Nasdem dengan perolehan 6.983 suara, posisi ke tujuh PKB dengan Perolehan 6.671 suara.

Sementara posisi ke delapan Gerindra dengan perolehan 6.568 suara. Sembilan PKN dengan perolehan 6.431 suara. Sepuluh PKS dengan perolehan 3.484 suara. Sebelas Demokrat 3.432 suara, selanjutnya Partai Bulan Bintang (PBB) dengan perolehan 2.755 su-

ara.

"Perolehan suara sah Partai politik Peserta pemilu dari setiap daerah pemilihan anggota DPRD tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam melampirkan suatu keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini." Kata Ketua KPUD Baubau, La Ode Supardi saat membacakan keputusan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2024 di kota Baubau di salah satu hotel ternama di baubau, Selasa malam

(05/03/2024).

Pada kesempatan itu juga, Ketua KPUD Baubau La Ode Supardi menyampaikan rasa terima kepada partai politik (Parpol), Saksi Parpol serta Ketua dan anggota Bawaslu Baubau sehingga proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kota Baubau pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah, dengan ditetapkannya hasil rekapitulasi Pemilu 2024, Berarti berakhir pula seluruh rangkaian acara rapat pleno rekapitulasi perolehan suara dan dinyatakan ditutup," tutup.*

PDIP soal Isu Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS: Pemilu Belum Kelar

Laporan: Hadi

JAKARTA-Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pereira menyoroti wacana program makan siang gratis oleh Prabowo-Gibran menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Ia mengaku heran dengan wacana tersebut. Padahal, KPU hingga kini juga belum mengumumkan hasil akhir Pemilu 2024.

"Saya ambil contoh saja satu hal yang kita belum apa-apa, belum selesai pemilu sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam Dana BOS, kan repot kita memperdebatkan

dan mempertanggungjawabkan seperti ini," kata Andreas dalam raker dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/3).

Andreas mengatakan anggaran makan siang gratis ini akan menelan biaya lebih besar dibandingkan seluruh anggaran Kemendikbudristek.

Ia lantas mengusulkan pembentukan kementerian khusus yang membawahi urusan program makan siang gratis. "Ketimbang kita harus masukkan DIPA dana BOS yang mungkin jumlah angkanya sedikit dengan dijejali anggaran yang begitu besar," tegasnya.

Perhimpunan Guru Tolak Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS

Andreas pun meminta agar diadakan evaluasi khusus perihal usulan yang berkenaan dengan program-program pemerintahan selanjutnya.

Wacana itu untuk pertama kalinya digulirkan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta

Ahmed Zaki Iskandar. Ia mengusulkan kepada Menko Airlangga Hartarto penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis.

Zaki menyampaikan itu ketika Airlangga hadir dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang,

Banten beberapa waktu lalu.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

Menko Airlangga tidak mengamininya langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program Prabowo-Gibran tersebut.

"Kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem,

punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," ujar Airlangga.

Pada Senin (4/3), Kemenko Perekonomian mengklarifikasi wacana yang menyebutkan Menko Airlangga mengusulkan penggunaan BOS untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limaneto menegaskan isu yang beredar di beberapa media atau lini masa tidak benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-

2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo Senin (4/3).

"Jadi, bukan BOS yang sudah jalan, tapi skemanya itu skema BOS, dia sebutnya BOS makan siang gratis, gitu kurang lebih. Jadi, usulannya dari sekolah atau Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang bisa dibilang, yang diusulkan oleh Pak Zaki," sambungnya.

Wacana itu pun mendapatkan penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan sebagian be-

sar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

Iman mengatakan P2G berharap gizi anak Indonesia terpenuhi. Akan tetapi, ia menekankan bahwa para guru juga harus mendapatkan asupan gizi.

Menurutnya, dana BOS diutak-atik untuk program makan siang gratis berpotensi tidak menyejahterakan guru dan memajukan pendidikan Indonesia.

"Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS," ucap Iman dalam keterangan resmi, Sabtu (2/3). (*)

Pimpin Apel Gabungan, Plh Sekda Provinsi Sultra Bahas Tema Dari Berakal Menjadi Berakhlak



Pewarta: Mashuri

SULTRA, BP-Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra), Laode Fasikin, S.PI, M. Si selaku staf ahli Gubernur Sultra, Bidang Pemerintah Hukum dan Politik, pimpin apel gabungan lingkup Pemprov. Sultra di Halaman Kantor Gubernur Sultra, (Senin, 04 Maret 2024)

Hadir dalam Apel Gabungan tersebut, Para Kepala OPD Lingkup Pemprov, Para Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang Lingkup Pemprov. Sultra, Pejabat Fungsional dan seluruh staf Pemprov. Sultra

"Kita bersama-sama dilapangan ini melaksanakan apel gabungan setiap hari senin, sebelum kita melaksanakan tugas-tugas kita di masing-masing OPD", kata La Ode Fasikin.

Lebih lanjut dikatakan, yakni Ada tema yang kita angkat pada pagi ini, yaitu "Dari Berakal Menjadi Berakhlak", banyak persoalan yang kita hadap, dalam merefleksikan tahun 2023, tema ini lahir

dari sekian rumusan masalah tetapi kita batasi masalahnya hanya 2 (dua) poin yaitu Honor dan Perjalanan Dinas, tandasnya.

Plh. Sekda juga mengatakan; masalah yang kita hadapi sekarang adalah apa yang kita lakukan dimasa lalu dan itu konsekuensinya adalah melakukan pengembalian, ini disebabkan karna persoalan secara administrasi maupun secara teknis yaitu : Secara teknis, pelaksanaan kegiatan tidak memahami aturan-aturan dari pekerjaan yang dilakukan terutama memahami Peraturan Gubernur (Pergub) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Pertama, honor-honor kegiatan bagi para narasumber maupun kegiatan lainnya, tidak mampu membedakan dalam penggunaan APBD, sehingga harus jelas peraturan mana yang digunakan dan kalau ada temuan-temuan harus mengembalikan.

Kedua, Perjalanan Dinas kadang kita tidak mematuhi peraturan yang sudah ada, sehingga dikatakan tidak men-

ginap tapi dikatakan menginap, kita tidak berangkat dikatakan berangkat. Hal ini merupakan temuan yang sifatnya akal-akalan, sehingga tema pagi ini sangat cocok.

Mudah-mudahan permasalahan di tahun 2023 tidak terulang di tahun 2024 ini, kemudian dua minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan penandatangan pakta integritas, sehingga bisa melahirkan sebuah sumberdaya manusia yang punya integritas, kinerja dan etos kerja yang baik

Lanjut, Kinerja yang baik dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik kualitas, maupun kuantitas dapat bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada masalah dikemudian hari

Sedangkan etos kerja merupakan suatu prilaku positif, baik itu sikap, mental maupun spirit lainnya sehingga bisa melahirkan sebuah motivasi kepada diri kita dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ini merupakan pesan dari pimpinan kita. Tutupnya. (*)

Pewarta: Lisna

Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menghadiri secara langsung Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional dengan tema "Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Aman, Ibadah Nyaman", bertempat di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (04/03/24).

Mengawali rapat koordinasi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyampaikan kembali atensi Presiden RI mengenai ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan 1445 H / 2024 M, dilanjutkan dengan penyampaian mengenai perkembangan pangan saat ini.

"Atensi Bapak Presiden mengenai ketersediaan pangan dan stabilitas harga jelang Bulan Suci Ramadan, selanjutnya diharapkan Kepala Daerah untuk melaksanakan 3 (tiga) hal yakni gelar Gerakan Pangan Murah (GPM), TPID agar koordinasi dan sinergi dengan baik, serta memantau harga pasar," ujarnya.

"Harga gabah saat ini Rp.7.040, untuk beras sendiri dapat dikalkulasikan kali 2 (dua) dari harga gabah yakni Rp.14.000 atau sudah masuk HET. Saat ini juga nilai tukar petani tinggi sekali sehingga perlu diseimbangkan dengan harga di hilir," tambahnya.

Selanjutnya Rakor dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang mengungkap data inflasi year on year dan month to month masing-masing Provinsi, serta menginstruksikan Kepala Daerah untuk memastikan situasi

aman dan kondusif jelang Bulan Suci Ramadan.



Pj Gubernur Sultra ABR

aman dan kondusif jelang Bulan Suci Ramadan.

"Saya instruksikan Kepala Daerah pastikan situasi aman dan kondusif jelang Bulan Ramadan, pastikan ibadah berjalan dengan baik, dan antisipasi arus mudik dan arus balik, serta pastikan keselamatan transportasi lebaran serta lakukan pemantauan harga dan stok ketersediaan pangan," ungkap Tito

Narasumber lain pada Rakor tersebut yakni Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan langkah antisipasi inflasi di Bulan Ramadan.

"Diharapkan Kepala Daerah dapat antisipasi inflasi jelang Bulan Ramadan. Komoditas penyumbang inflasi terbesar yakni tarif angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, dan daging sapi," katanya.

Narasumber berikutnya yakni Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi yang memastikan ketersediaan beras, jagung, cabe, telur, daging ayam, dan daging sapi yang termasuk dalam 12 komoditas utama aman hingga April 2024.

"Terkait cabai secara neraca cukup namun penanganan antar daerah perlu dilakukan gerakan tanam cabai di Pekarangan Pangan Lestari (P2L)," ungkapnya.

Selanjutnya Dirut Perum Bulog Prof Bayu menyatakan

dukungannya kepada Pemerintah Daerah melalui GPM. "Selain beras SPHP, ada juga beras komersial (tidak subsidi), akan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," kata Prof Bayu.

Narasumber berikutnya, Dirjen Perdagangan Kemendag Isy Karim menyampaikan update harga barang kebutuhan pokok dan barang di 649 pasar pada seluruh Kabupaten/Kota.

"Mulai 1 Maret 2024, beberapa pasar alami penurunan seperti di Pasar Induk Johar dan Cipinang. Khusus beras alami kenaikan harga sebesar 6,16%, untuk Region B sebesar 10,95%, dan Region C (Maluku dan Papua) sudah alami penurunan," ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Arief Hartawan menyampaikan 3 (tiga) hal yaitu, pertama pentingnya jaga inflasi volatile food (dibawah 5%). Kedua, pengendalian inflasi volatile food butuh dukungan Pemerintah Pusat. Ketiga, BI akan mendukung pengendalian inflasi volatile food.

"BI Pusat beserta jaringan kantor perwakilan di daerah siap bersinergi menjaga terjaganya stabilitas harga pangan," ungkapnya.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatrata akan berusaha untuk penggantian biaya dalam proses distribusi guna menjaga stabilitas harga. Isa

juga mengatakan akan terus percepat proses penggantian biaya yang dikeluarkan Bulog dan ID Food.

Lanjut, Staf Khusus Menhub Andri Mufianas mengatakan Kemenhub telah bentuk strategic delivery unit team untuk kendalikan tarif angkutan udara selama Bulan Suci Ramadan dengan fokus prioritas cargo pangan.

Terakhir, Kabareskrim Polri Wahyu Widada menyatakan bahwa Satgas Pangan Polri akan terus lakukan kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam penanganan masalah pangan "ultimum remedium". Wahyu juga berharap ketersediaan dan stabilitas harga komoditi Bapokting menjadi perhatian dalam menyambut HBKN Idul Fitri 2024.

Di tempat yang sama, Pj Gubernur Sultra mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Mendagri dan Narasumber lainnya.

"Kami akan tindaklanjuti instruksi Bapak Mendagri dan berbagai arahan dari Narasumber lain. Hal ini sebagai komitmen dan tanggung jawab kami dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga menyambut Puasa dan Idul Fitri 2024," tegas Pj Gubernur. (*)

Sekda Buton Hadiri Pesta Adat Ma'ata'ano Galampa Wabula



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si. menghadiri Pesta Adat Ma'ata'ano Galampa di Baruga Desa Wabula, pada Minggu, 3 Maret 2024.

Pesta Adat yang dimulai sejak malam Jumat lalu mengangkat tema Melalui Pesta Adat (Ma'ata'ano Galampa Wabula) Tahun 2024 Kita Tingkatkan Semangat Tohora Asa-Asa, To Tadhe Asa-Asa, Pianano Lompa, Pianano Koicu'ae dalam Mewujudkan Masyarakat Hukum Adat Wabula yang Rukun dan Damai.

Di awal sambutannya Sekda mengucapkan selamat dan apresiasi kepada masyarakat adat Wabula yang menyelenggarakan kegiatan hari ini karena tradisi tersebut masih dipertahankan secara turun-temurun

dan merupakan hal yang patut disyukuri karena kegiatan seperti ini bisa diwariskan sampai anak cucu ke depan.

"Saya berharap melalui kegiatan ini kita bisa menggali makna dari setiap rangkaian pesta adat ini. Pesta adat ini identik dengan rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen kemudian hasil laut yang selama satu tahun ini kita nikmati. Potensi Sukun yang ada di Wabula ini jika butuh pembinaan, nanti kami dari Pemerintah Kabupaten Buton akan fasilitasi ke Provinsi dan dimana-mana tahu akan Sukun Wabula karena rasanya berbeda dengan tempat lain," ujarnya.

Kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Wabula karena Pemilihan Umum serentak 14 Februari kemarin berjalan dengan lancar, damai, dan berhrap bisa berlan-

jut hingga seterusnya.

"Sesuai dengan temanya Masyarakat Hukum Adat Wabula yang Rukun dan Damai atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih karena hajatan pilpres dan pilcagleg di Kabupaten Buton berjalan lancar dan tidak ada halangan mudah-mudahan hingga Pilkada serentak kerukunan dan keamanan bisa terus berjalan," ucapnya.

Dan diakhir sambutan Sekda Buton menyampaikan turut berbelasungkawa atas berpulangnya Amanto Imamu dari Masyarakat Adat Wabula.

"Sebelum mengakhiri atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Buton turut berduka cita bahwa orang tua kita telah meninggalkan kita dan mari kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah Swt, Alfatihah," ucap Sekda. (*)

Pj Bupati Busel La Ode Budiman Buka Rakor Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting



Laporan : Eron

BUSEL, BP-Upaya untuk menurunkan angka Stunting bukan hanya tugas pemerintah daerah namun merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh warga masyarakat. La Ode Budiman, SKM., M.MKes Pj. Bupati Buton Selatan membuka Rapat Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Aksi 1 / Analisis Situasi di Gedung Wisata, Batauga Selasa, 27/02/2024.

Pj. Bupati Buton Selatan La Ode Budiman, SKM., M.MKes mengatakan bahwa program orang tua asuh menjadi salah satu strategi dalam membantu percepatan penurunan stunting di Buton Selatan. Kita harus kompak dalam upaya penurunan stunting. Selain program orang tua asuh, ada program lain seperti Dapur Dahsyat yang prinsip kerjanya adalah bagaimana mengelola makanan yang tinggi protein

dapat diminati oleh balita dan anak-anak. Kepala Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP-PKB) Buton Selatan La Asari, SP., M.Si, mengatakan bahwa Tim Pendamping Keluarga menjadi yang paling pokok dalam membantu percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan. Isu stunting masih menjadi perhatian serius. Tim Pendamping Keluarga memiliki peran strategis

dalam membantu menurunkan angka stunting di Buton Selatan. Lebih lanjut bahwa hasil analisa yang ada di lapangan saat ini di beberapa wilayah di Buton Selatan, kasus stunting kian menurun. Pasalnya, tim tersebut memiliki fungsi sebagai pendamping bagi anak yang terindikasi risiko stunting yang diupayakan agar tidak terkena stunting. Berdasarkan hasil Aplikasi e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis

Masyarakat), angka stunting pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga menembus angka 22 persen dari yang sebelumnya bahwa sejak tahun 2019 angka Stunting di Buton Selatan 46 %, ditahun 2020 menjadi 45 % kemudian Covid tahun 2021 dan pada Desember 2022 menjadi 32,6% sedangkan di tahun 2023 prosentasinya dalam proses semoga makin menurun, sd tahun 2025 ditargetkan angkanya 14%, ini sesuai karena kerja keras para Kader sebagai garda terdepan, dengan berkolaborasi dengan Dasa Wisma maupun Majelis Ta'alm di Kabupaten Buton Selatan. (*)

Pj. Bupati Buton La Ode Mustari Hadiri Rakor Inflasi dan Stabilisasi Pangan Jelang HBKN 2024

Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pj Bupati Buton Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Pangan selama dan pasca Puasa-Idul Fitri 2024 di Ruang VIP Kantor Bupati, pada Senin, 4 Maret 2024.

Rakor tersebut diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Neg-

eri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. di Hotel Kempinski Jakarta dan dihadiri seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga para pengusaha.

Di awal arahannya Mendagri mengatakan rakor ini merupakan arahan dari Presiden sebagai upaya mengendalikan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional Puasa dan Idulfitri tahun 2024. Ada beberapa

daerah di Indonesia yang secara bulanan angka inflasinya masih jauh dari angka Nasional.

"Jadi untuk kepala daerah yang inflasinya di atas nasional, untuk melakukan pengendalian ketersediaan dan stabilitas pangan menjelang HBKN di Bulan Ramadan dan Idulfitri", ujarnya.

Mendagri menyampaikan bahwa pengendalian tersebut perlu berbagai langkah-langkah penting yang harus di perhatikan yakni ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bah-

an pokok dan stabilitas keamanan selama HBKN serta peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah.

"Ketika harga-harga naik atau langka perlu kita jaga, ini sangat berkorelasi dengan situasi keamanan. Tolong kita jaga agar masyarakat khususnya yang beragama islam dapat menjalankan ibadah ramadhannya dengan baik, hindari potensi gejolak yang memancing situasi apalagi berhubungan politik identitas keagamaan. Kemudian kita harus men-

jaga arus mudik dan arus balik," katan-

nya. Selanjutnya Ia menjelaskan bahwa dalam mengambil kebijakan harus dapat mecari balance antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen karena Indonesia adalah negara yang memproduksi sekaligus mengkonsumsi.

"Kita Indonesia jika harganya terlalu murah sekali kasihan petani dan penghasil lainnya. Termasuk pengusaha yang memproduksi serta nelayan. Sebaliknya

kalau misalnya harganya tinggi sekali masyarakat menjerit karena tidak terjangkau harganya. Oleh karena itu kita harus membalance angka inflasinya terkendali menyenangkan kedua-duanya," katanya.

Kemudian Mendagri mengimbau agar lembaga pusat bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dan di daerah setelah rakor para gubernur bisa melakukan rapat untuk mengendalikan inflasi daerah masing-masing sesuai

dengan permasalahan masing-masing, begitupun dengan bupati/wali kota agar koordinasi dengan Forkopimda dan pengusaha.

"Semuanya kita lakukan demi masyarakat tersedia barang pokok dan juga harga dapat terjangkau. Tujuannya itu supaya masyarakat tenang dan tolong untuk rekan-rekan di daerah di situasi seperti ini hati-hati betul jangan menaikkan pajak dan retribusi yang tidak perlu yang akan memberatkan rakyat," imbaunya. (*)

Pabrik IVD Terbesar di Indonesia Dukung Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan



Laporan: Warman

BEKASI-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meresmikan PT. Virtue Diagnostic Indonesia, yang merupakan perusahaan In Vitro Diagnostic (IVD) inovatif lokal bertaraf internasional, di Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa (5/03/2024). Kehadiran perusahaan ini sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian Industri di bidang In Vitro Diagnostic (IVD) nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan reagen imunologi dan hematologi baik nasional maupun regional.

Menkes Budi mengatakan, komitmen dari PT. Virtue Diagnostic Indonesia, yang telah berinvestasi di Indonesia, akan sangat mendukung pilar ketiga transformasi kesehatan yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu sistem ketahanan kesehatan. Hal ini memungkinkan semua kebutuhan, mulai dari alat-alat kesehatan, obat-obatan, hingga vaksin, dapat diproduksi di dalam negeri.

“Alat-alat ini dan reagensinya atau bahan bakunya nanti akan banyak dibutuhkan dan selama ini kita masih impor. Namun, dengan adanya bantuan dari teman-teman Virtue yang membangun pabrik di Indonesia tentu sangat membantu dan kami sangat menghargainya,” kata Menkes Budi.

Terdapat dua alat kesehatan yang diproduksi oleh PT Virtue Diagnostic Indonesia, yakni hematologi analyzer dan chemiluminescence immunoassay, yang dapat memenuhi kebutuhan di fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Kedua alat itu akan sangat bermanfaat untuk memeriksa kondisi atau status kesehatan masyarakat.

Lebih lanjut, Menkes Budi mengungkapkan bahwa mulai tahun ini pemerintah akan mengarahkan agar ada alokasi dana yang sangat besar untuk pengadaan alat-alat kesehatan yang diproduksi dalam negeri hingga 3-4 tahun ke depan. Hal ini agar Indonesia memiliki potensi

besar dalam hal belanja layanan kesehatan sehingga dapat menjadi peluang besar bagi para investor.

“Jadi, kami akan melakukan pen-gadaan dengan kebijakan pemerintah. Kami akan menghubungi Anda para investor, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengutamakan penelitian dan pengembangan serta manufaktur di Indonesia. Ini adalah untuk sistem ketahanan kesehatan kita,” ujarnya.

Menkes Budi berharap, produksi alat-alat kesehatan di dalam negeri akan membantumu memenuhi kebutuhan dengan lebih cepat dan harga lebih terjangkau.

Sementara, Director PT. Virtue Diagnostic Indonesia Martin Marpaung mengatakan, pembangunan pabrik IVD Indonesia merupakan strategi untuk memperkuat basis produksi dan distribusi produk-produk Virtue di Indonesia serta memasuki pasar IVD di negara-negara Asia Tenggara.

“Dengan memiliki basis produksi di Indonesia sehingga bisa memenuhi kebutu-

han produk domestik dan global akan produk-produk IVD yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Martin dalam konferensi pers, Selasa (5/03/2024).

Martin menjelaskan, produk unggulan dari IVD adalah produk instrumen dan reagen imunologi dengan teknologi Chemiluminescence (ChLIA) yang saat ini menjadi satu-satunya produk ChLIA yang diproduksi di Indonesia. Produk-produk Virtue yang diproduksi di Indonesia juga telah dilakukan uji klinis yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI, RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), dan Rumah Sakit Akademik UGM Yogyakarta (RSA UGM).

Terdapat 4 grup produk yang telah dan akan diluncurkan di pasar domestik tahun ini, yakni produk imunologi, hematologi, kimia klinik, dan molekuler dengan menggunakan jenama VERCENTRA untuk instrumen dan VIRTUE untuk reagen.

Saat ini, Virtue Diagnostic Indonesia

Menkes Budi Ajak Kader Posyandu Melayani Ibu Hamil Hingga Lansia



Laporan: Yeti

JAKARTA-Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengajak kader posyandu untuk memberikan pelayanan pada seluruh siklus hidup manusia, yakni mulai dari dalam kandungan hingga lanjut usia (lansia). Hal tersebut disampaikan saat makan siang bersama kader-kader posyandu di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Menkes mengatakan, selama ini pelayanan kader posyandu lebih fokus pada ibu hamil dan balita. Padahal, populasi masyarakat Indonesia yang lebih dewasa semakin banyak.

“Kami meminta kader posyandu bukan hanya melayani

ibu hamil dan balita, tapi seluruh siklus hidup, yaitu ibu hamil, balita, remaja, dewasa, dan lansia,” kata Menkes Budi.

Menkes menambahkan, kader posyandu harus mengikuti pembelajaran untuk dapat melayani seluruh siklus hidup manusia. Kelas-kelas digital akan diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu. Sebanyak 1,5 juta kader posyandu akan didata untuk mendapatkan edukasi.

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan berencana melakukan digitalisasi di posyandu. Hal ini sejalan dengan tujuan dari transformasi kesehatan pilar keenam, yakni transformasi teknologi kesehatan. Nantinya, semua posyandu akan melakukan pencatatan se-

cara digital.

“Posyandu bisa punya data orang-orang di bawahnya, jadi tahu yang darah tinggi mana, yang kolesterol mana, jadi harus diingatkan supaya diobati,” tambah Menkes Budi.

Diketahui, Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan memberikan apresiasi kepada 10 kader terpilih berupa makan siang bersama. Kader tersebut merupakan pemenang kuis kompetensi kader seputar pemberian makanan tambahan (PMT) dan penimbangan bayi dan balita. Dalam kegiatan tersebut, Menkes dan Wamenkes dapat mendengarkan langsung aspirasi dari kader posyandu yang mengabdikan di berbagai daerah.*

telah memiliki lebih dari 60 tenaga ahli yang berpengalaman untuk mendukung riset dan pengembangan serta produksi produk-produk IVD. Perusahaan juga memiliki fasilitas manufaktur yang mampu memproduksi lebih dari 1000 unit instrumen per tahun dan lebih dari 6.000 liter reagen per hari. Kapasitas produksi tersebut dapat ditingkatkan sesuai dengan peningkatan kebutu-

han.

Martin menambahkan, Virtue Diagnostic Indonesia telah mendapatkan Sertifikat Standar Industri Alat Kesehatan dan Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) pada Desember 2023 lalu.

“Kami bertekad untuk terus mendukung pemerintah untuk meningkatkan kompetensi manufaktur yang menghasilkan produk-produk

berkualitas tinggi sehingga Virtue Diagnostic Indonesia bisa menjadi manufacturing partner yang melayani kebutuhan domestik dan regional Asia Tenggara,” tuturnya.

Peresmian Pabrik IVD terbesar di Indonesia ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI Lucia Rizka Andalucia dan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triandi Machmudin.*

Baubau Post
 Kritik, Lugas, Independen
 Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
 Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
 Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
 Redpel : Hengky TA
 Korlip : Hengky T.A
 Redaktur : Alyakin, Kasrun
 Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma

Layouter : Ririn
 Pracetak : Aditya
 Cetak : Jamal

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
 Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
 Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika
 Komisaris : Erna Agule
 Direktur Utama : Andina Latief, SKM
 Manager Keuangan : Nabila D.A
 Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
 Kepala Sirkulasi : Jamal
 Administrasi : Salvana
 Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
 Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
 Kepala Biro Buton : Rahman
 Kepala Biro Busel : Salvana
 Kepala Biro Buteng : Andini
 Kepala Biro Bombana :
 Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
 Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
 Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
 Agen Pasarwajo :
 Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

KPK Dalam IUP di Maluku Utara Tanpa Mekanisme Lewat Anak Buah Bahlil

Pewarta: Alwan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Hasyim Daeng Barang diperiksa KPK pada Jumat, 1 Maret 2024.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba-- saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

“Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuan antara pengetahuan lainnya kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari ter-

sangka AGK selaku Gubernur Maluku,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi.

Sebelumnya, Rabu, 24 Januari 2024, Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap di-

sangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan. (*)

Eks Kadis Pertanahan DIY Divonis 4 Tahun Bui Kasus Mafia Tanah



Mantan Kadis Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido divonis 4 tahun pidana penjara karena dianggap terbukti menerima gratifikasi dalam kasus mafia tanah.

Laporan: Hamid

YOGYAKARTA- Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun kepada Mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY, Krido Suprayitno dalam kasus mafia tanah berupa penyelewengan tanah kas desa (TKD) di Caturtunggal, Depok, Sleman.

Krido menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Rabu (6/7). Sidang dipimpin oleh Tri Asnuri Herkutanto selaku ketua majelis hakim. “Menjatuhkannya pidana kepada terdakwa Krido dengan pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan,” kata Tri dalam amar putusannya.

Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primer Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primer dan dakwaan pertama subsidair

penuntut umum,” kata Tri.

Namun, majelis hakim menyatakan Krido terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana dalam dakwaan kedua primer Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Krido turut dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa perampasan barang, meliputi dua buah SHM/Purwomartani Nomor 14576 dengan luas tanah 997 meter persegi dan SHM/Purwomartani Nomor 14577 dengan luas tanah 811 meter persegi. Keduanya atas nama Krido Suprayitno.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkap hal yang memberatkan. Antara lain, mengkhianati kepercayaan negara dalam mengelola pembangunan desa, menikmati uang hasil tindak pidana, dan tak mendukung pember-

antasan korupsi.

Sementara keadaan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, belum pernah dihukum, dan telah mengembalikan atau menitipkan uang gratifikasi senilai Rp4.755.050.000.

Atas putusan ini, Krido setelah berdiskusi dengan kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Respons serupa disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

Krido sendiri sebelumnya dituntut pidana penjara delapan tahun setelah didakwa kesatu primer Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Serta dakwaan kedua primer Pasal 12 huruf B jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta menetapkan Krido sebagai ter-

sangka dalam kasus dugaan mafia tanah penyalahgunaan tanah kas desa (TKD) di wilayah Caturtunggal, Sleman, Juli 2023 lalu.

Ia diduga telah menyalahgunakan jabatannya sebagai kadispertaru DIY dan terlibat dalam perkara penyalahgunaan TKD Caturtunggal oleh Direktur Utama PT Dez-tama Putri Sentosa, Robinson Saalino.

Adapun untuk Robinson sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp400 juta subsidier 4 bulan kurungan dalam kasus mafia TKD di Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, Kamis (19/11) lalu. Ia lalu menyatakan banding atas putusan ini.

Kejati DIY juga menetapkan Robinson sebagai tersangka dalam dugaan kasus penyalahgunaan dua lahan TKD di Maguwaharjo, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, Kamis (2/11).

Ia kali ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Indonesia Internasional Capital serta pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara. (*)

KPK Sebut Ada Mark Up di Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Pewarta: Alwan

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut ada penggelembungan anggaran atau mark up dalam pengadaan kelengkapan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI sehingga diduga merugikan keuangan negara miliaran Rupiah.

“Umumnya pengadaan barang dan jasa ketika terjadi kemahalan harga. ini kasusnya kalau enggak salah mark up harga, ada persekongkolan. Katanya mahal padahal di pasar enggak seperti itu,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantornya, Jakarta, Rabu (6/3).

Alex belum bisa menyampaikan informasi resmi peri-

hal penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut karena belum menerima banyak informasi dari tim penyidik. Termasuk ketika ditanya keterkaitan anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

“Kalau detailnya saya belum dapat infonya seperti itu apakah ada kerja sama dengan BURT dan sebagainya,” kata pimpinan KPK berlatar belakang hakim tindak pidana korupsi (tipikor) ini.

Dalam kasus ini, KPK sudah mencegah tujuh orang tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.

Mereka ialah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar; Kepala Bagian Pengelo-

laan Rumah Jabatan DPR Hippi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.

Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com pada laman LPSE DPR, di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.

Tender itu antara lain. Pengadaan Kelengkapan Sarana

RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar, Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan

HPS Rp37,7 miliar. Kemudian Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.

Pada Rabu, 31

Mei 2023, KPK telah mengklarifikasi Sekjen DPR Indra Iskandar terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi. Saat itu, Indra terlihat mengenakan kalung berwarna merah

sebagai tanda tamu penindakan KPK.

Indra tidak memberi penjelasan ketika dikonfirmasi awak media mengenai kehadirannya di kantor lembaga antirasuah tersebut. (*)

Kadispora Baubau Moh Tasdik Resmi Buka POPDA 2024 Baubau



Laporan: Andina L

BAUBAU, BP- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) tahun 2024 tingkat Kota Baubau resmi dibuka Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Baubau, Dr. Moh. Tasdik mewakili Pj Wali Kota Baubau di Lapangan Bulu Tangkis Mr.Ken Senin (4/3/2024).

Pembukaan POPDA tahun 2024 tingkat Kota Baubau turut dihadiri Ketua DPRD Kota Baubau, Forkopimda, perwakilan Dispora Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Sekda Baubau, Kepala OPD se-Kota Baubau, Camat, Kepala Sekolah, panitia, wasit/juri, guru pendamping, dan para peserta.

Dr. Moh. Tasdik yang membacakan sambutan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh. Rasman Manafi, SP, M.Si mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan POPDA tahun 2024. Kegiatan ini merupakan momentum penting bagi siswa-siswi untuk menunjukkan bakat olahraga. Disamping itu, POPDA juga bertujuan mengukur pencapaian pembinaan atlet pelajar di daerah serta menjadi ajang seleksi tim yang akan diproyeksikan ke Popnas.

"Kegiatan ini merupakan rutinitas berjenjang dari tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Nasional, untuk mencetak calon atlet terbaik di kalangan pelajar,"

ujar Dr. Tasdik membacakan sambutan Pj Wali Kota Baubau. Dengan tema "Berprestasi dan Berdaya Saing", Tasdik berharap POPDA dapat melahirkan atlet muda potensial yang akan mengharumkan nama daerah di bidang olahraga.

Tasdik mengingatkan peserta untuk menjunjung sportivitas dan persatuan menuju Kota Baubau yang berjiwa akselerasi, kolaborasi, dan responsif sesuai arahan Wali Kota. Kemudian, kepada wasit dan juri untuk bertindak adil sesuai aturan. Sedangkan kepada atlet agar mengedepankan profesionalisme dan semangat dalam berkompetisi sebab menang kalah bukanlah hal utama. (*)

Wa Radja: Penyesuaian Tarif NJOP dan PBB Tidak Akan Memberatkan



Kepala bapenda Kota Baubau Wa Radja

Pewarta: Amran

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau berencana melakukan penyesuaian tarif Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan menurunkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari berkisar 0,1 persen menjadi 0,08.

"Jadi dengan adanya penurunan tarif

dari 1 persen menjadi 0,08 persen rata rata PBB yang ada banguannya justru turun karena yg disesuaikan adalah NJOP tanah, sedangkan bangunan tetap NJOP nya, jadi yg kami lakukan adalah Penyesuaian NJOP," ujar Kepala Bappeda Hj Wa Radja, SE ketika ditemui di ruang kerjanya Senin (4/3/2024).

Menurut Wa Radja, sebenarnya yang mengalami penyesuaian NJOP adalah nilai NJOP diatas 15 miliar dan berlaku untuk perusahaan yang disesuaikan Bea Perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB ini penyesuaian NJOP karena BPHTB ada penguangan dari 60 juta menjadi 80 juta.

DLH Konsel Studi Tiru Prestasi Nasional "ProKlim" Kota Baubau



Pewarta : Amat Jr

BAUBAU, BP---- 18 orang personil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dipimpin langsung Kepala Dinas H. Ichsan Porosi, ST,MTP., Selasa sore (5/3) tiba di Kota Baubau dan bertatap muka dengan DLH Kota Baubau, yang diterima langsung Kadis, Halfia Hamiru, A.Pi.,M.Si dan jajarannya.

Kunjungan tersebut dalam rangka studi tiru berkaitan Program Kampung Iklim (ProKlim), dimana Kota Baubau menjadi tujuan karena kota ini satu-satunya daerah di Sulawesi Tenggara yang telah mendapatkan penghargaan pada level nasional.

"Kami melaksanakan studi tiru di Kota Baubau berkaitan dengan ProKlim, karena Kota Baubau telah sukses dan menjadi satu-satunya daerah di Sultra yang mendapatkan piagam penghargaan level nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup," kata Ichsan Porosi yang juga pernah menduduki jabatan sebagai kepala Bappeda Konsel tersebut.

ProKlim adalah program pemerintah pusat yang telah ditetapkan sebagai gerakan nasional

pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat, merupakan salah satu langkah strategis dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal.

"Baubau status kota, tapi punya ProKlim yang sukses, karena itu kami datang melakukan studi tiru, mempelajari semua prosesnya, dari pemilihan wilayah, akselerasi program, pelibatan komponen masyarakat. Yang paling unik dan khas, karena ProKlim Baubau didukung oleh kehadiran lembaga Adat masyarakat, kami mempelajari itu," kata Ichsan.

Sementara Kadis LH Baubau, Halfia Hamiru menjelaskan, kampung sasaran ProKlim di Baubau adalah Kelurahan Gonda Baru di Kecamatan Sorawolio, kelurahan yang se-

cara geografis adalah salah satu batas terluar dari kota ini, tetapi karena model "Bekerja bersama" yang diterapkan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, dengan melibatkan semua stakeholder, maka Gonda Baru memperoleh penghargaan di level nasional.

"Namun yang harus dicatat, bukan karena keinginan mendapatkan penghargaan kami dorong Gonda Baru, tetapi banyak hal, dimulai dari kondisi wilayah, dan dukungan stakeholder. Niatnya mengangkat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, dan semua disambut baik dari level pemerintah kecamatan, kelurahan, karang taruna, dan lembaga adat setempat," kata Halfia.

Dukungan dan kerja keras inilah dengan penghargaan. "Yang pasti ban-

yak nilai tambah, lahan-lahan juga semakin produktif, bahkan di sana ada hutan adat (kamombo) yang tidak saja dihormati keberadaannya tetapi memberi dampak ekonomis masyarakat sekitar, di situ nilai tambahnya," ujar Halfia.

Usai mengambarkan kondisi Kampung ProKlim Baubau ini, dilaksanakan sesi tanya jawab yang berlangsung sekitar 2 jam, dimana pihak DLH Konsel sendiri akan menjadikan Gonda Baru ini sebagai "role model" dengan menyesuaikan kondisi daerahnya. Desa yang dipersiapkan sebagai ProKlim di Konsel adalah Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara, dengan mempertimbangkan tingkat kemapanan desa tersebut.

Usai melaksanakan diskusi terarah, rencananya pihak DLH Konsel besok akan mengunjungi beberapa kawasan di Kota Baubau termasuk Gonda baru sebelum bertolak pulang ke Konawe Selatan. (*)

Diungkapkan, penyesuaian NJOP dilakukan karena amanat Undang-Undang, dimana Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 itu nilai perolehan objek pajak tidak Kena Pajak pada BPHTB itu 60 juta. Setelah lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Kota dan Pemerintah Daerah itu menjadi 80 juta.

Oleh sebab itu, ka-

lau NJOP disesuaikan, maka dari sektor BPHTB Kota Baubau tetap mendapatkan PHD sehingga solusinya, NJOP itu disesuaikan, tetapi sasarannya bukan PBB tetapi BPHTB.

"Dengan adanya penyesuaian NJOP bahwa tarif PBB itu kita turunkan dari 0,1 persen NJOP satu sampai 1 miliar itu menjadi 0,08 hari ini. Sehingga kalau kita lihat dari simulasi hitungan, justru PBB

itu malah turun bukan naik. Kemudian untuk BPHTB dari pengurangan 60 juta ke 80 juta juga penyesuaiannya tidak terlalu signifikan. Karena pengurangan itu 60 juta menjadi 80 juta. Setelah itu baru dikali tarif 5 persen. Tarifnya tidak berubah sama dengan UU lama nomor 28 Tahun 2009 dan UU nomor 1 Tahun 2022," ungkap Wa Radja.

Wa Radja menam-

bahkan, untuk Kota Baubau saat ini sudah 4 tahun belum ada penyesuaian tarif. Padahal, harusnya minimal 3 tahun sudah harus ada penyesuaian tarif NJOP. Itu pun, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah malah penyesuaian taraf itu 20-100 persen kisarannya. (*)